

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Purworejo)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :  
**Ulfa Suluh Prabawati**  
NIM 14.0102.0107

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah  
Kabupaten Purworejo)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:  
**Ulfa Suluh Prabawati**  
NIM 14.0102.0107

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

# SKRIPSI

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Ulfa Suluh Prabawati**

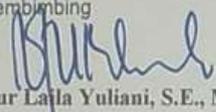
NPM 14.0102.0107

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

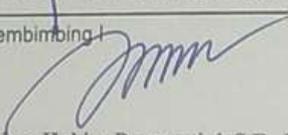
Pada tanggal **08 Februari 2019**.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

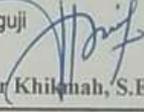
  
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Pembimbing I

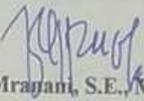
  
Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc

Pembimbing II

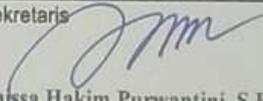
Tim Penguji

  
Siti Noor Khilamah, S.E., M.Si., Ak

Ketua

  
Muji Mrazani, S.E., M.Si., Ak., CA

Sekretaris

  
Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, **18 FEB 2019**.....

  
Dra. Marlina Karnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Suluh Prabawati

NIM : 14.0102.0107

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

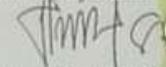
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 8 Februari 2019

Pembuat Pernyataan,



Ulfa Suluh Prabawati

NIM. 14.0102.0107



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfa Suluh Prabawati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 23 Maret 1996  
Agama : Islam  
Status : Menikah  
Alamat Rumah : Sobodukuh, 14/06, Japan,  
Tegalrejo, Magelang  
Alamat Email : [ulfasuluh233@gmail.com](mailto:ulfasuluh233@gmail.com)

Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar	(2002 - 2008)	:	SD Negeri Japan
2. SMP	(2008 - 2011)	:	SMP Negeri 1 Tegalrejo
3. SMA	(2011 - 2014)	:	SMA Negeri 2 Kota Magelang
4. PERGURUAN TINGGI	(2014 - 2019)	:	S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

### Pendidikan non formal :

- Pelatihan Laboratorium Komputer Universitas Muhammadiyah Magelang
- Pelatihan laboratorium bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah  
Magelang

Magelang, 8 Februari 2019

Peneliti



Ulfa Suluh Prabawati

NIM. 14.0102.0107

## **MOTTO**

*Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan*

*(QS. Al insyiroh : 5-6)*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(QS. Al Baqarah: 286)*

*Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus terus bergerak. (Albert  
Einstein)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)”.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penuliis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc., Ak., dan Ibu Annisa Hakim Purwantini, SE., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Siti Noor Khikmah, SE., M.Si., Ak selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Ibu Muji Mranani, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan banyak masukan dalam perbaikan skripsi.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, nasehat, semangat, dukungan baik moral maupun material.
9. Sahabat dan teman seperjuangan "Akuntansi Angkatan 2014" yang selalu memberikan dukungan dan do'a. Serta teman-teman KKN Pengarengan, Kaliangkrik atas do'a, dukungan dan motivasinya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis harap semoga karya sederhana ini bisa memberikan manfaat. Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Magelang, 8 Februari 2019

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan..	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi. ....	iv
Halaman Riwayat Hidup. ....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar. ....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel. ....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran. ....	xiii
Abstrak. ....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian. ....	8
D. Kontribusi Penelitian. ....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
A. Telaah Teori. ....	11
1. Teori Agensi.....	11
2. Kualitas Laporan Keuangan.....	12
3. Pemerintah Daerah.....	15
4. Kualitas Aparatur Daerah. ....	15
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	16
6. Pengawasan Keuangan Daerah. ....	18
7. Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akual. ....	19
B. Telaah Penelitian Sebelumnya.....	21
C. Perumusan Hipotesis.....	23
D. Model Penelitian .....	28
<b>BAB III METODA PENELITIAN</b>	
A. Populasi dan Sampel.....	29
B. Data Penelitian. ....	30
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel. ....	31
D. Metoda Analisis Data.....	33
1. Statistik Deskriptif .....	33
2. Uji Kualitas Data.....	34
a. Uji Validitas.....	34
b. Uji Reliabilitas.....	35
3. Analisis Regresi Linier Berganda .....	36
4. Pengujian Hipotesis.....	37
a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	37

b. Uji F .....	37
c. Uji t.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sampel Penelitian.....	40
B. Statistik Deskriptif Responden. ....	41
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	42
D. Uji Kualitas Data.....	44
1. Uji Validitas .....	44
2. Uji Reliabilitas .....	45
E. Analisis Regresi Linier Berganda. ....	46
F. Uji Hipotesis. ....	48
1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	48
2. Uji F .....	48
3. Uji t .....	49
G. Pembahasan.....	52
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan. ....	59
B. Keterbatasan Penelitian.....	59
C. Saran . ....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>LAMPIRAN</b> .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD 2013-2017.....	3
Tabel 1.2 Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Purworejo 2013-2017 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	21
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel. ....	31
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	40
Tabel 4.2 Profil Responden.....	41
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif. ....	42
Tabel 4.4 <i>Cross Loading</i> .....	44
Tabel 4.5 Pengujian Reliabilitas. ....	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Linier Berganda.....	46
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	48
Tabel 4.8 Uji F .....	49
Tabel 4.9 Uji t .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian. ....	28
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	38
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	39
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F.....	49
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Kualitas Aparatur Daerah.....	50
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi . ....	51
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Pengawasan Keuangan Daerah . ....	51
Gambar 4.5 Penerimaan Hipotesis Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis AkruaI .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. ....	65
Lampiran 2. ....	66
Lampiran 3. ....	73
Lampiran 4. ....	85
Lampiran 5. ....	86
Lampiran 6. ....	91
Lampiran 7. ....	93
Lampiran 8. ....	94
Lampiran 9. ....	95
Lampiran 10. ....	97

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)**

**Oleh :  
Ulfa Suluh Prabawati**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan 85 responden yang bekerja di bagian keuangan OPD Kabupaten Purworejo. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

***Kata kunci : kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, pemahaman standar akuntansi berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009):

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Yuliani, 2016).

Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan daldo anggaran lebih, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan yaitu dasar pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum sesuai sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK RI masih terdapat laporan keuangan yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Berikut perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013-2017:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD 2013-2017**

<b>LKPD (Tahun)</b>	<b>OPINI</b>			
	<b>WTP</b>	<b>WDP</b>	<b>TMP</b>	<b>TW</b>
2013	30%	59%	9%	2%
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	36%	5%	1%
2016	70%	26%	4%	0%
2017	76%	21%	3%	0%

*Sumber: IHPS BPK RI Semester I Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara menyeluruh dalam 5 tahun terakhir mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP naik dari 30 % pada tahun 2013 menjadi 76 % pada tahun 2017. Kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh pemerintah daerah. Kenaikan opini dari TW/ TMP/ WDP menjadi WTP dan TW/ TMP menjadi WDP dikarenakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP (BPK RI, 2018).

Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara keseluruhan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sehingga Kabupaten Purworejo termasuk dapat

mempertahankan opini tersebut. Berikut daftar tabel opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2013-2017.

**Tabel 2.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Purworejo 2013-2017**

Tahun	Opini
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: semarang.bpk.go.id*

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo dapat mempertahankan opini audit yang diberikan oleh BPK RI. Opini wajar tanpa pengecualian artinya opini audit yang diterbitkan seluruh informasi dalam LKPD bebas dari salah saji material. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas pencapaiannya mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian selama lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 ([purworejokab.go.id](http://purworejokab.go.id)).

Laporan keuangan yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian harus terus dipertahankan. Upaya yang dapat ditempuh diantaranya adalah dengan peningkatan Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Adanya kompetensi sumber daya manusia dengan ini kualitas aparatur daerah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Evicahyani dan Setiawina (2016) tentang Analisis Faktor-Faktor yang

Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan ada pengaruh tidak Langsung Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Yuliani (2016) tentang Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pengendalian Intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti Efendi dan Abdullah (2017) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kuasa, *et al* (2016) tentang Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian Putri, *et al* (2017) tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan

berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Efendi dan Abdullah (2017) dengan persamaan variabel kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah.

**Perbedaan penelitian** ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:

**Pertama** menambahkan variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena dengan adanya standar akuntansi yang berlaku maka pemerintah dapat menyusun laporan keuangannya dengan lebih mudah. Standar tersebut mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual (Putri, *et al*, 2017). **Kedua**, adalah objek penelitian, dimana objek penelitian ini adalah OPD Kabupaten Purworejo karena kualitas laporan keuangan Kabupaten Purworejo selama lima tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sehingga laporan keuangan tersebut dapat dikatakan berkualitas dan dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah yang lain. Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pemahaman standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**D. Kontribusi Penelitian**

- a. Manfaat teoritis:
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kabupaten Purworejo.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi, dapat mengembangkan literatur-literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu berkaitan dengan analisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Manfaat praktis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta wacana kepada pihak OPD dalam mengembangkan kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis. Bagian ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian

BAB III Metoda Penelitian. Bagian ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta metode analisis data, dan pengujian hipotesis

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bagian ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V Kesimpulan. Bagian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan teori agensi dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan hubungan keagenan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menjadikan jasa yang menjadi kepentingan rakyat serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah. Rakyat mewajibkan pemerintah bertanggung jawab melalui mekanisme pelaporan dan rakyat melalui legislatif, dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintahan sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan kecurangan.

Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (a) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (b) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *prinsipal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

## **2. Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas adalah proses pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

- a. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- 2) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - 3) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - 4) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan secara fakta, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut:
- 1) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - 3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **3. Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### **4. Kualitas Aparatur Daerah**

Menurut Martoyo (2007), sumber daya manusia atau aparatur adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (Adhi & Suhardjo, 2013).

Kompetensi sumber daya manusia atau aparatur mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Untuk menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggung jawabnya dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik (Setiawati & Sari, 2014)

## **5. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan, dan jenis lain yang berhubungan dengan teknologi (Delanno dan Deviani, 2013). Teknologi informasi pada saat ini sangat berperan dalam mendukung kegiatan organisasi atau perusahaan agar kegiatan suatu perusahaan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga

bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Menurut Sutabri (2014), teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan.

Perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan oleh organisasi bisnis, namun organisasi publik juga memanfaatkannya, termasuk pemerintah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip dan tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pada keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan kepada publik. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut model yang dikembangkan Thompson *et al* (1991), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor sosial

- b. *Affect* (perasaan individu)
- c. Kesesuaian tugas
- d. Konsekuensi jangka panjang
- e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi

## **6. Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan (Yosa, 2010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan keuangan daerah dapat mengontrol kegiatan OPD dalam menggunakan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Pengawasan dimaksudkan, agar pemerintah daerah melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dalam mengelola keuangan. Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan negara, dilakukan berdasarkan

ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah pasal 23 ayat 1 UU No.25 tahun 1999 (Ulum & Sofyani, 2016).

Pengawasan diarahkan untuk: (1) menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, (2) dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien, (3) dapat tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilakukan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut, (4) cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Pengawasan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengawasan intern pemerintahan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat.

## **7. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual**

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pemahaman akuntansi

berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dalam mengukur Pemahaman tentang SAP yaitu dengan memahami penyajian, komponen, pengakuan laporan keuangan serta kesalahan koreksi dalam pencatatan. Manfaat yang diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki beberapa manfaat, yaitu: (1) Sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; (2) digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan (5) sebagai acuan dalam penyusunan sistem akuntansi karena keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, meliputi: (1) pengakuan; (2) pengukuran; dan (3) pengungkapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Evicahyani & Setiawina (2016)	Kompetensi SDM Penerapan SAP Pemanfaatan SIPKD Sistem pengendalian internal	Kompetensi SDM, penerapan SAP, pemanfaatan SIPKD, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2	Fikri & Martiningsih (2016)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Kompetensi Aparatur Peran Audit Internal	penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
3	Kuasa <i>et al</i> (2016)	Kompetensi pejabat pengelola keuangan Regulasi Pengawasan keuangan daerah	Kompetensi pejabat pengelola keuangan, Regulasi dan Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Yuliani (2016)	Kompetensi sumber daya manusia Penerapan sistem akuntansi	Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
		keuangan daerah Pemanfaatan teknologi informasi Penerapan standar akuntansi pemerintahan Pengendalian intern	positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah- an, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Efendi & Abdullah (2017)	Kualitas aparatur daerah Pemanfaatan teknologi informasi Pengawasan keuangan daerah	kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah
6	Putri, <i>et al</i> (2017)	Sumber daya manusia Pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Sistem pengendalian internal Penerapan sistem manajemen keuangan daerah	Sumber daya manusia, Pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, Sistem pengendalian internal, dan Penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**  
**(Lanjutan)**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
7	Wijayanti (2017)	Kompetensi SDM Implementasi akuntansi berbasis akrual	Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

*Sumber: jurnal penelitian terdahulu diolah, 2018*

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Martoyo (2007), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuannya. Untuk menilai kualitas aparatur dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari tingkat tanggungjawabnya dan kompetensi sumber daya tersebut. Kualitas aparatur yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas aparatur daerah dalam melaksanakan sistem akuntansi dapat menimbulkan hambatan jika pemahaman penerapan ilmu akuntansinya rendah. Kualitas aparatur daerah merupakan salah satu

faktor yang menentukan terpenuhinya kualitas laporan keuangan (*agent*) sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak *principal*. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah yang baik, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori ini sesuai dengan penelitian Efendi dan Abdullah (2017) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

***H1. Kualitas aparatur daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah***

## **2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Jurnal & Supomo (2002) pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Berdasarkan Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan keagenan mengenai suatu kontrak di mana satu atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent*

untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*, maka diperlukan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan cepat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangannya.

Penelitian Efendi dan Abdullah (2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

***H2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah***

### **3. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Yosa (2010) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Banyak hal yang dapat disalahgunakan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah. Dengan penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan konflik antara *principal* dengan *agent*. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan sebagai kendali penyelewengan yang dapat terjadi dalam pemerintahan. Adanya pengawasan keuangan daerah diharapkan dapat menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa semkakin baik pengawasan keuangan daerah, maka semakin baik kualitas laporannya.

Penelitian Efendi & Abdullah (2017) dan Kuasa *et al* (2016) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

***H3. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah***

#### **4. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akruwal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan LKPD sesuai dengan SAP yang merupakan

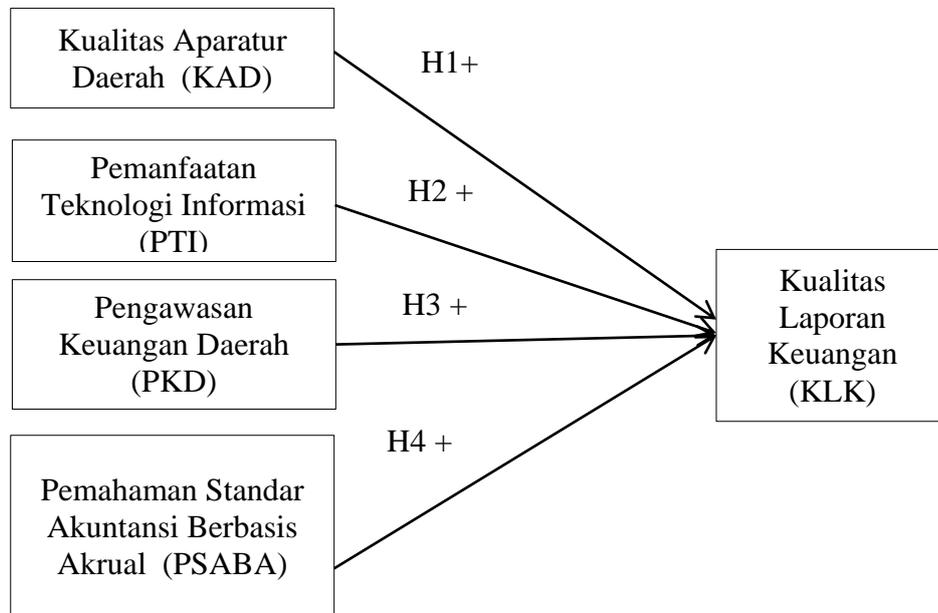
syarat/pedoman yang memiliki kekuatan hukum. Adanya pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori keagenan menyatakan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Pemerintah sebagai *agen* memiliki akses atas laporan keuangan pemerintah yang tidak dimiliki *prinsipal*. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya asimetri informasi, namun asimetri informasi dapat diantisipasi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang laporan keuangan. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan tentang sistem akuntansi pemerintah mengacu kepada peraturan pemerintah dan ketentuan perundang-undangan yaitu berdasarkan PP No 71 Tahun 2010. Semakin lengkap dan tersedianya pelaksana sistem dan prosedur tentang pengelolaan keuangan daerah maka akan menjadi lebih mudah menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dari teori tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin baik pemahaman atas standar akuntansi berbasis akrual, maka semakin baik kualitas laporan keuangannya.

Penelitian Putri, *et al* (2017) menunjukkan bahwa pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

*H4. Pemahaman standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*

**D. Model Penelitian**



**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Purworejo.

Sampel responden dari penelitian ini menggunakan teknik *perposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Sekaran, 2009). *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penentuan kriteria tersebut dilakukan karena pihak tersebut mampu untuk menggambarkan kualitas laporan keuangan dari tiap-tiap unit OPD, dan dapat mempresentasikan kualitas laporan keuangan pemetintah Kabuapten Purworejo secara keseluruhan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD Kabupaten Purworejo.

2. Lama menjabat pekerjaan adalah minimal 2 tahun, karena telah mempunyai pemahaman terhadap standar akuntansi berbasis akrual dengan baik.

Penentuan kriteria responden didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan atau akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan OPD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

## **B. Data Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli dan data yang digunakan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Penelitian dengan data primer menggunakan teknik survei yaitu suatu perancangan penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul. Survey juga bertujuan untuk melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. `

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo.

## 2. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survei (*field research*) yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria responden di OPD Kabupaten Purworejo dengan menggunakan item-item pernyataan yang telah dibatasi dalam pemberian jawaban dengan bobot 1 sampai 5 untuk tingkat setuju atau ketidaksetujuannya.

## C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
1	<b>Variabel Dependen</b> Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan (andal relevan, dapat dipahami dan dapat dibanding-kan) (Evicahyani &Setiawina, 2016). Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal serta laba dan ruginya.	Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan dengan 7 item pernyataan. Variabel ini mengacu pada penelitian Triyanto (2017), kemudian diukur menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**  
**(Lanjutan)**

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
2	<b>Variabel Independen</b>		
	Kualitas Aparatur Daerah	Kualitas Aparatur daerah adaah kemampuan dasar yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik. Aparatur daerah harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik (Fikri & Martiningsih, 2016).	Variabel kualitas aparatur daerah dalam penelitian ini diukur dengan 3 indikator yaitu tanggung jawab, latar belakang pendidikan, dan pelatihan dengan 10 item pernyataan. Variabel kualitas aparatur daerah mengacu pada penelitian Triyanto (2017) kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.
	Pemanfaat-an Teknologi Informasi	Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan (Sutabri, 2014).	Variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur dengan 4 indikator dan 8 item pernyataan yang mengacu pada penelitian Triyanto (2017) kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.

**Tabel 3.1**  
**Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**  
**(Lanjutan)**

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
	Pengawasan Keuangan Daerah	Pengawasan adalah upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. (Yosa, 2010).	Variabel pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan 4 indikator dan 7 pernyataan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Lillati (2011) kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju.
	Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis Akrua	Peraturan adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual (Putri, <i>et al</i> , 2017).	Variabel standar akuntansi berbasis akrual dalam penelitian ini diukur dengan 10 item pernyataan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Utami (2017) kemudian diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin, yaitu 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju

*Sumber: data diolah, 2018*

## **D. Metoda Analisis Data**

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif yaitu suatu metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *varian*, *minimum*, *maksimum*, *sum*, dan *range* yang diperoleh dari jawaban responden yang diterima. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian, seperti jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, dan lama masa kerja (Ghozali, 2018).

### **2. Uji Kualitas Data**

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan kuesioner dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian tersebut untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas data, yaitu:

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor*

*Analysis (CFA). Confirmatory Factor Analysis (CFA)* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator - indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Faktor konfirmasi dapat menguji apakah indikator benar benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmasi akan mengelompokkan masing - masing indikator ke dalam beberapa faktor (Ghozali, 2018).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik yang menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Mayer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMONSA). Nilai yang dikehendaki harus  $> 0,50$  dan *cross loading*  $> 0.50$  untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Ghozali (2018) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang *reliable*.

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan Regresi Linear Berganda:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KAD + \beta_2 PTI + \beta_3 PKD + \beta_4 PSABA + e$$

Keterangan :

KLK = Kualitas Laporan Keuangan

KAD = Kualitas Aparatur Daerah

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah

PSABA = Pemahaman Standar Akuntansi Berbasis  
Akrual

A = Konstanta

B = Koefisien

E = *Error*

#### 4. Pengujian Hipotesis

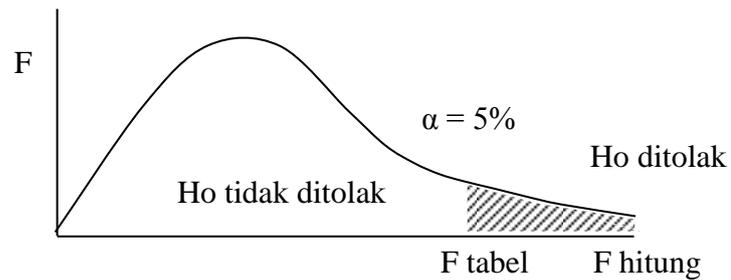
##### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

##### b. Uji f (*Goodness of Fit*)

Uji f pada dasarnya menunjukkan apakah model regresi yang dibuat oleh peneliti itu baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan atau dapat juga dikatakan sebagai pengujian kecocokan sepadan antara hasil pengamatan tertentu dengan frekuensi nilai harapan atau frekuensi teoritis (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$  dan uji satu sisi, sebagai berikut:

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $p\ value < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima berarti model penelitian ini *fit* atau layak.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $p\ value > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak berarti model penelitian ini tidak *fit* atau tidak layak.

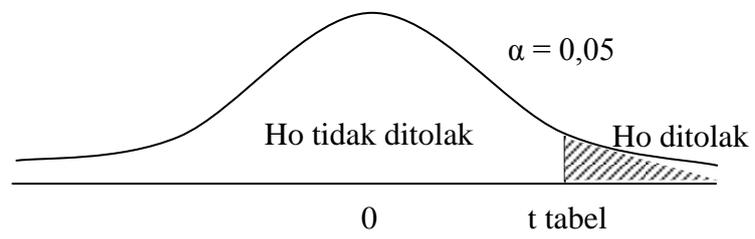


**Gambar 3.1**  
**Uji f**

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan (Ghozali, 2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = (n-1)$  dan uji satu sisi sebagai berikut:

- 1) Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau  $p \text{ value} > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**  
**Uji t**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Purworejo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 85 pegawai yang bekerja pada bagian keuangan OPD Kabupaten Purworejo yang meliputi Kasubag Keuangan, Bendahara maupun Staff Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan pemahaman standar akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **B. Keterbatasan**

1. Jumlah sampel yang digunakan masih relatif kecil karena tidak semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo dapat diteliti. Sehingga hasil yang dicapai belum dapat diterima secara umum atau digeneralisasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo.

2. Tidak dapat dipastikan bahwa pengisian kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek penelitian yang dimaksud, dan tidak dapat dipastikan bahwa jawaban dari pengisian kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya.
3. Terbatasnya penelitian yang hanya meneliti 4 variabel independen yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **C. Saran**

Saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya sebatas Kabupaten Purworejo, misalnya ditambah wilayah Karesidenan Kedu agar generalisasi hasil lebih baik.
2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti komitmen organisasi, karena apabila suatu organisasi karyawannya tidak memiliki komitmen dalam bekerja, maka tujuan dari organisasi tersebut tidak akan tercapai (Septarini dan Frans, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitaas Laporan Keuangan. *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93–111.
- Agustini, Rahmawati Dwi. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan. *Skripsi*. Magelang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Bastian, Indra. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.
- BPK RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018.
- BPK. (2018). LHP LKPD. [www.semarang.bpk.go.id](http://www.semarang.bpk.go.id)
- Efendi, L., & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah ( Studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah ). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(September), 182–195.
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5.3, 403–428.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harlinda. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Sorot Vol 11 No 2*,
- Hartono, Jogiyanto. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jurnali, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2), 214–228.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. (2016). Pengaruh Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Lapora Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol.16.2
- Kuasa, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 47–56.

- Lillati, S. (2011). Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tanggamus. *Skripsi*. Lampung: Program Sarjana Universitas Lampung.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Yogyakarta: Andi.
- Martoyo, S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta:BPFE.
- Moha, F., Kalangi, L., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1359–1370.
- Nasikhin, Kwafi Muchamad. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur, Peran Audit Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kantor SKPD Karesidenan Kedu). *Skripsi*. Magelang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nurillah, As Syifa. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10). (n.d.).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan"
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang " Sistem Informasi Keuangan Daerah"
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang "Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual"
- Putri, I. D., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *E-Proceeding of Management*, 4(2), 1732–1739.
- Sati, Eva Saras. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Magelang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septarini, Dina F., & Frans P. (2016). Interaksi Komitmen Organisasi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 3 (2).
- Setiawati, E., & Sari, S. P. (2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi. *Syariah Paper*, 427–444.
- Setyowati, Lilis *et al.* (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja Vol 20 No.2*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surastiani, Dyah Puri dan Bestari Dwi Handayani. (2015). Analisis Faktorfaktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sutabri, T. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Tanjung, Amries Rusli, Desi H. dan Sri. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi KIAT Vol 27 No.2*.
- Triyanto, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Wijayanti, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3).
- Yosa. (2010). Pengertian Pengawasan. Retrieved from [www.itjen-depdagri.go.id](http://www.itjen-depdagri.go.id)
- Yuliani, N. L. dan R. D. A. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, 14, 57.